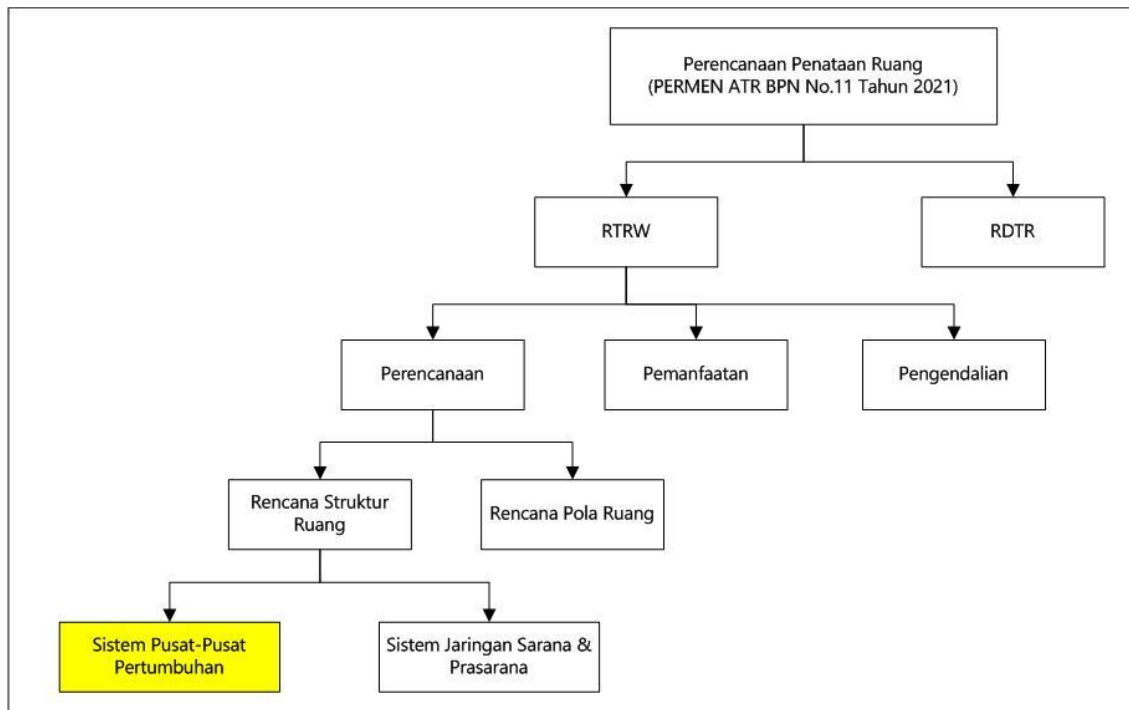


BAB II

KONSEP PERENCANAAN

2.1 Konsep Perencanaan

Konsep perencanaan merupakan penjabaran mengenai rencana yang akan dilakukan serta target tujuan yang ingin didapatkan dalam penelitian. Konsep perencanaan ini juga menjadi acuan dalam proses penelitian yang dilakukan. Kegiatan dalam penyusunan Tugas Akhir terkait “Arahan Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Blora” diuraikan dalam bentuk konsep penelitian sebagai berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 2. 1 Konsep Perencanaan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Blora

2.2 Landasan Teori

2.1.1 Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) memiliki dua arti, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri karena sifat hubungannya memiliki unsur- unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi (baik ke dalam maupun ke luar). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan, sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) (Muslim dkk., 2023).

Menurut Sjafrizal (2008) mengatakan bahwa terdapat empat karakteristik utama sebuah Pusat Pertumbuhan yaitu: (1) Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi

pada suatu lokasi tertentu; (2) konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian; (3) terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut, dan (4) dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut.

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai faktor utama dalam menilai kemajuan masyarakat suatu wilayah. Suatu daerah umumnya memiliki potensi yang berbeda dengan daerah lainnya karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat pusat pertumbuhan sesuai dengan hierarki dan fungsinya. Menurut Imelda (2013) terdapat tiga orde pada skala regional yaitu :

1. Pusat pertumbuhan primer (utama)

Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya. Pusat pertumbuhan orde satu ini biasanya dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya.

2. Pusat pertumbuhan sekunder (kedua)

Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat dari sub daerah, seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini.

3. Pusat pertumbuhan tersier (ketiga)

Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhi.

2.1.2 Pengembangan Wilayah

Perkembangan kota diperkitakan akan terus meningkat di masa depan, baik dari jumlah penduduk, kondisi fisik, maupun penyebaran ruangnya. Pertumbuhan penduduk, kepadatan, penyebaran fasilitas umum, dan potensi lahan jadi faktor utama yang mendorong perluasan penggunaan lahan dan perubahan struktur internal wilayah kota. Sejalan dengan hal tersebut, muncul berbagai gagasan mengenai konsep pengembangan wilayah yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari teori-teori lokasi.

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan wilayah bersangkutan (Ambardi & Prihawantoro, 2009). Dalam proses pengembangan wilayah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya berperan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Tujuan dari pengembangan wilayah mencakup aspek yang saling berhubungan, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Artinya, pengembangan wilayah merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh melalui pembentukan pusat-pusat produksi, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan layanan logistik.

2.1.3 Interaksi Wilayah

Interaksi atau imbal daya merupakan suatu proses saling memengaruhi antara dua hal, dan jika dikaitkan dengan ruang maka pengaruh tersebut terjadi antar ruang yang bersangkutan (Yunus, 2010). Interaksi terjadi karena adanya perbedaan fungsi wilayah, potensi sumber daya, atau layanan yang berbeda. Sehingga dapat memunculkan kebutuhan untuk saling berhubungan antar wilayahnya. Maka dari itu, pola dan tingginya nilai interaksi antar wilayah sangat dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya alam dan sosial daerah tersebut, dan kemudahan dalam menjangkaunya.

Model interaksi spasial, secara umum membahas arus dan pergerakan antar wilayah berdasarkan (1) pemisahan spasialnya; (2) kesesuaiannya (adanya hubungan saling melengkapi antara wilayah asal dan wilayah tujuan); (3) peluang atau kesempatan (adanya lokasi alternatif di antara wilayah asal dan wilayah tujuan yang bisa mengalihkan arus) (Kelly, 2019). Secara umum, teori interaksi wilayah menekankan bahwa arus manusia maupun barang muncul karena adanya kebutuhan saling melengkapi antara satu tempat dengan tempat lain. Namun, nilai interaksi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor jarak, waktu tempuh, serta keberadaan lokasi alternatif lain yang dapat menjadi pilihan.

Interaksi wilayah sering dijelaskan melalui model gravitasi. Model gravitasi merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan kota besar dan kota kecil seperti dua benda yang saling tarik menarik, dimana besarnya daya tarik dipengaruhi oleh ukuran (jumlah penduduk) dan jarak yang memisahkan keduanya. Dengan kata lain, semakin besar ukuran atau populasi suatu kota, semakin besar pula daya tariknya. Namun, semakin jauh jaraknya semakin kecil pula daya tarik wilayah tersebut (Paolilli, 2023).

2.1.4 *Global Human Settlement Layer (GHSL)*

Global Human Settlement Layer (GHSL) merupakan kerangka data dan alat yang dikembangkan dari data penginderaan jauh (EO), sensus, dan informasi geografis berbasis partisipasi sukarela. Kerangka ini menghasilkan peta global area terbangun, distribusi populasi, serta tipologi permukiman (GHSL, 2023).

GHS-SMOD adalah model klasifikasi permukiman desa-kota yang diambil dari sistem GHSL. GHS-SMOD ini mengklasifikasikan tipologi permukiman melalui logika klaster populasi, dan luas wilayah terbangun. Proses klasifikasi pada setiap grid GHS-SMOD dilakukan dengan menggabungkan data area terbangun (*built-up*) dan data populasi raster GHSL. Input untuk GHSL-SMOD adalah data raster spasial populasi seluas 1 km² (GHS-POP), permukaan terbangun (GHS-BUILT-S), dan lapisan lahan (GHS-LAND). Setiap sel pada grid memiliki bentuk dan ukuran yang seragam, sehingga mencegah terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan bentuk dan ukuran unit. Hal ini menjadi nilai tambah dibandingkan dengan metode yang menggunakan ukuran dan kepadatan penduduk dari wilayah administratif lokal.

GHS-SMOD ini merupakan penggambaran lebih lanjut dari konsep urbanisasi (*DEGUBRA*) ke dalam skenario data GHSL. Pada hierarki pertama, GHS-SMOD mengklasifikasikan sel grid 1 km² dengan menjadi tiga kategori utama yakni : (1) pusat kota (kota), (2) kelompok kota (kota dan pinggiran kota), dan sel lainnya dikategorikan sebagai sel jaringan pedesaan (Sari & Tambunan, 2022). Kriteria untuk tiga kategori pada hierarki pertama adalah :

- 1) "Pusat Kota" (Klaster Kepadatan Tinggi). Pusat perkotaan terdiri dari sel-sel grid dengan kepadatan setidaknya 1.500 jiwa penduduk per km² lahan, total populasi 50.000 jiwa penduduk, serta kepadatan kawasan terbangun sebesar 50%.
- 2) "Kelompok Perkotaan" (Klaster Kepadatan Sedang). Klaster perkotaan terdiri dari sel-sel grid dengan kepadatan setidaknya 300 jiwa per km² lahan, total populasi 5.000 jiwa penduduk di klaster tersebut.
- 3) "Pedesaan" (Klaster kepadatan rendah) adalah semua sel lain diluar Klaster Perkotaan dengan kepadatan sel-sel grid kurang 300 jiwa per km².

Di beberapa negara dengan pembangunan perkotaan dengan kepadatan rendah dan pemisahan penggunaan lahan yang kuat, metode *DEGUBRA* (Tingkat Urbanisasi) dapat menyebabkan satu kota terbagi menjadi beberapa "pusat perkotaan". Pada hierarki kedua, GHSL-SMOD mengklasifikasikan sel-sel grid 1 km² menjadi:

- 1) "Pusat Perkotaan" Pusat perkotaan terdiri dari sel-sel grid dengan kepadatan setidaknya 1.500 penduduk per km² lahan permanen, dan memiliki setidaknya 50.000 jiwa penduduk.
- 2) "Kelompok Perkotaan Padat" Kelompok perkotaan padat terdiri dari sel-sel grid dengan kepadatan 1.500 penduduk per km² lahan permanen, dan memiliki setidaknya 5.000 - 50.000 jiwa penduduk.
- 3) "Klaster Perkotaan Semi-Padat" Kelompok perkotaan semi terdiri dari sel-sel grid yang berjarak setidaknya 2 km dari kelompok perkotaan padat atau pusat perkotaan dengan kepadatan setidaknya 900 jiwa per km dan populasi kolektif sedikitnya 2.500 jiwa penduduk.
- 4) "Pinggiran Kota" Pinggiran kota adalah semua sel lainnya yang termasuk dalam kelompok perkotaan tetapi bukan bagian dari pusat perkotaan, kelompok perkotaan padat, atau kelompok perkotaan semi-padat.
- 5) "Klaster Pedesaan" Klaster pedesaan terdiri dari sel-sel dengan kepadatan setidaknya 300 jiwa per km² lahan permanen dan memiliki sedikitnya 500 – 5.000 jiwa penduduk.
- 6) "Pedesaan Kepadatan Rendah" Pedesaan kepadatan rendah dengan kepadatan setidaknya 50 jiwa penduduk per km² tanah permanen.
- 7) "Pedesaan Kepadatan Sangat Rendah" Pedesaan kepadatan sangat rendah dengan kepadatan kurang dari 50 jiwa penduduk per km² tanah permanen.
- 8) "Jaringan Air" Jaringan air dengan semua sel dengan lebih dari 0,5 bagian ditutupi oleh air permukaan permanen yang tidak dihuni atau dibangun.